

**Sarana Prasarana dan Pembiayaan Penyelenggaraan PAUD dalam Persepektif
Manajerial**

Neni Komalasari *, Dhea Ardiyanti, Sendi Tresa Utami Adi Putri *****

*STAI Al-Ittihad Cianjur

** Universitas Pendidikan Indonesia

*** STAI Al-Ittihad Cianjur

Email penulis:

Email: nenikomalasarijr11@gmail.com, Dheaardy@upi.edu, stresautami@gmail.com

ABSTRACT

Infrastructure and financing are one of the complex problems in the management of Early Childhood Education today. This is caused by the environment of the educational institution itself. The main problem lies in the accumulated need for an ideal management of educational institutions. An ideal educational institution requires a set of references for planning, organizing, implementing, and controlling all available resources to achieve the goals that have been set effectively and efficiently. This study uses a qualitative research method of literature study. Data analysis uses an interactive model by condensing data, presenting data and drawing conclusions or verification. The results showed that the right managerial solution to overcome the problem of facilities and infrastructure as well as Early Childhood Education financing from a managerial perspective was through collaborative management planning. This is because the high need for funding for Early Childhood Education institutions can at least be overcome with various opportunities for financing support that have the potential to be obtained. Various opportunities can be through the government or private parties that are not binding on the Early Childhood Education institution itself. However, despite collaborating with the government and the private sector, the Early Childhood Education institution's commitment to the rules to meet the priority scale is a must. The priority scale of human resource planning, infrastructure and financing must be implemented by Early Childhood Education institutions. This is so that the institution has a balance of financing stability despite changes in social economic conditions.

Keywords: *facilities, infrastructure, financing, managerial*

ABSTRAK

Sarana prasarana dan pembiayaan menjadi salah satu permasalahan yang pelik dalam pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini saat ini. Hal ini disebabkan oleh lingkungan lembaga pendidikan itu sendiri. Masalah utamanya terletak pada akumulasi kebutuhan dari manajemen lembaga pendidikan yang ideal. Lembaga pendidikan yang ideal memerlukan seperangkat acuan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang ada untuk memperoleh target yang telah diputuskan secara efektif serta efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka. Analisis data memakai model interaktif dengan melakukan kondensasi data, penyampaian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi manajerial yang tepat untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana serta pembiayaan PAUD dalam perspektif manajerial adalah dengan cara perencanaan manajemen kerjasama sekolah, masyarakat dan mitra. Sebab banyaknya keperluan akan keuangan instansi PAUD minimalnya bisa diatasi dengan macam-macam kesempatan dukungan keuangan yang berpotensi untuk didapatkan. Berbagai peluang bisa dilakukan dengan pihak swasta yang tidak mengikat terhadap lembaga PAUD itu sendiri. Namun, walaupun mengadakan kerjasama dengan pihak swasta, komitmen lembaga PAUD terhadap kaidah untuk memenuhi skala prioritas menjadi sebuah keharusan. Manajemen skala prioritas perencanaan SDM, sarana prasarana dan pembiayaan harus dilaksanakan oleh lembaga PAUD itu sendiri dengan sistem manajemen yang terbuka dan transparan. Hal ini agar lembaga memiliki stabilitas neraca pembiayaan walaupun kondisi ekonomi sosial sedang tidak stabil.

Kata Kunci: sarana, prasarana, pembiayaan, manajerial

PENDAHULUAN

Sarana prasarana dan keuangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada saat ini masih menjadi persoalan pelik dalam konteks penyelenggaraan PAUD secara nasional. Hal ini disebabkan di lingkungan PAUD itu sendiri diakui bahwa permasalahan ini menghambat terhadap terciptanya lembaga PAUD yang berkualitas (Sihaloho, 2016). Dalam penelitian Nurlatif (2019) dijelaskan bahwa masalah utama sarana dan prasarana pembiayaan penyelenggaraan PAUD didasarkan pada akumulasi permasalahan dari berbagai indikator. Indikator yang dimaksud diantaranya lemahnya investasi pendidikan pada jenjang PAUD. Padahal berdasarkan penelitian dari Suryani (2007) lebih memperhatikan investasi pada pendidikan artinya sedang membantu meningkatkan kualitas SDM suatu bangsa untuk masa depan.

Selain lemahnya investasi Pendidikan, fenomena lainnya yaitu tidak ada penghargaan status guru di instansi PAUD nonformal dan guru yang memiliki tingkat pendidikan sarjana 1 PAUD. Bahkan yang memiliki keahlian dibidang psikologi atau kependidikan hanya sekitar 23,06 %. Hal ini menjadikan

minimnya kualitas program di instansi PAUD dan minimnya keikutsertaan sanak keluarga serta masyarakat atau mitra dalam PAUD. Berdasarkan penelitian Jamilah (2019) menjelaskan bahwa jalinan kemitraan dan kerjasama antara instansi PAUD terhadap orangtua, masyarakat dan mitra dapat meningkatkan pelaksanaan program yang ada di lembaga itu sendiri. Selain itu, akumulasi permasalahan yang terjadi adalah semakin trend fokus program belajar dan mengajar di PAUD mengacu terhadap suasana pendidikan (membaca, menulis dan berhitung). Berdasarkan penelitian dari Wulansuci (2019) menjelaskan bahwa calistung memiliki peran menjadikan anak usia dini mengalami stres akademik sebab desakan melanjutkan ke sekolah dasar yang mewajibkan dapat calistung mengakibatkan terabaikannya peningkatan budi pekerti anak. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan belajar di lembaga PAUD. Permasalahan lainnya yang terjadi di saat ekonomi Indonesia menurun seperti banyaknya permasalahan gizi serta pertumbuhan anak usia dini yang tidak normal atau stunting.

Berbagai indikator permasalahan inilah yang mencuat ke permukaan. Hal ini menyebabkan permasalahan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Inilah yang menjadi persoalan pelik dalam konteks penyelenggaraan PAUD secara nasional. Sementara sarana serta prasarana serta pembiayaan penyelenggaraan PAUD merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam memanaj lembaga PAUD itu sendiri. Hal ini sangat penting sebab berdasarkan penelitian dari Rohiyatun (2021) bahwa sarana prasarana adalah satu cara usaha yang paling penting dalam meningkatkan kualitas PAUD, sehingga diperlukan manajemen sarana prasarana dan pembiayaan baik dalam pengembangan kualitas PAUD agar lebih baik. Tentu saja untuk mewujudkannya memerlukan berbagai macam strategi pengelolaan dari pendekatan dengan berbagai indikator.

Berdasarkan penelitian Rasmani (2020) menjelaskan bahwa berhasil dan tidaknya pengelolaan lembaga PAUD bisa menjadikan naik dan turunnya kualitas lembaga PAUD itu sendiri. Menilik bahwa anggaran yang dialokasikan pemerintah berdasarkan penelitian Idris (2010) menjelaskan bahwa anggaran pendidikan di Indonesia hanya 20% yang

terdapat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sekitar 1,4% dari PDB. Terlalu kecil kalau disandingkan dengan negara-negara lain seperti di Asia. Berbagai alasan yang menyebabkan Indonesia terendah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan. Berdasarkan Soedijarto (2008) salah satunya adalah dana tidak mencukupi dan banyak sektor lain yang lebih membutuhkan. Tentu saja anggaran dengan nominal itu belum mencukupi sebab di dalamnya sudah termasuk anggaran untuk gaji dan tunjangan para guru. Oleh sebab itu diperlukan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyelenggaraan PAUD harus dari lembaga itu sendiri, tanpa bergantung pada alokasi yang sudah dianggarkan oleh pemerintah.

Semua indikator permasalahan tersedianya sarana prasarana, investasi, pemanfaatan, perawatan, serta pemusnahan sarana prasana berawal dari kebutuhan manajemen PAUD yang ideal. Hal ini sebagai langkah upaya untuk mendesain program PAUD yang berkualitas. Berdasarkan Graffin (2004) menjelaskan jika manajemen itu sendiri terdiri dari perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, serta pengendalian

terhadap semua sumber daya yang ada. Semua itu untuk memperoleh tujuan yang telah diputuskan secara efektif dan efisien. Dari serangkaian manajemen PAUD yang dijalankan dengan baik akan memudahkan menyusun perencanaan yang baik pula, baik dari penyusunan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyelenggaraan PAUD. Perencanaan yang bagus setidaknya dapat membalas serangkaian berbagai pertanyaan. Menurut Terry (2010) bahwa pertanyaan utama yang akan digali yaitu aksi apa yang harus dikerjakan, mengapa aksi itu wajib dikerjakan, dimana aksi itu dilakukan, kapan aksi itu dilakukan, siapa yang akan melaksanakan aksi itu dan bagaimana caranya melakukan aksi itu.

Dari apa yang sudah dipertanyakan dalam perencanaan manajemen tersebut tentu akan berimplikasi terhadap berkembangnya pembelajaran dan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM). Pada akhirnya, semua ini berfokus terhadap kuantitas sarana prasarana. Inilah yang menyebabkan peningkatan kebutuhan untuk memenuhi pembiayaan anggaran.. Sementara akumulasi indikator yang sudah dijelaskan memicu hal pelik yang sulit dipecahkan. Untuk itulah adakalanya Lembaga PAUD itu sendiri mengorbankan standar sarana

prasarana yang ada di instansi PAUD. Tentu saja hal ini akan berdampak pada Manajemen SDM, sarana prasarana, dan pembiayaan saling terkait.. Untuk kebutuhan sarana dan prasarana seharusnya hanya untuk kebutuhan yang efektif dan menopang implimentasi pembelajaran. Sehingga hal ini bisa tertuang dalam kurikulum yang bisa menumbuhkan motivasi anak dalam belajar (Wicaksono et al., 2019).

Agar motivasi anak dalam belajar bertambah diperlukan keyamanan dalam berbagai hal di lembaga PAUD. Sarana Prasarana adalah aspek yang sangat urgen dalam merencanakan sarana prasarana di lembaga PAUD perlu rancangan manajemen keuangan. Kebutuhan akan tenaga kerja manusia (SDM) dan ketersediaan sumber daya sangat memengaruhi manajemen perencanaan pembiayaan. Semakin tinggi kualitas keduanya, semakin besar jumlah dana yang harus dialokasikan dalam perencanaan pembiayaan lembaga PAUD. Sistem manajemen yang baik sangat penting dalam menangani sarana dan prasarana serta pembiayaan penyelenggaraan PAUD dengan semua akumulasi indikator kesulitan lainnya yang sukar. Sebab sistem manajemen yang baik bisa menjamin ketersediaan

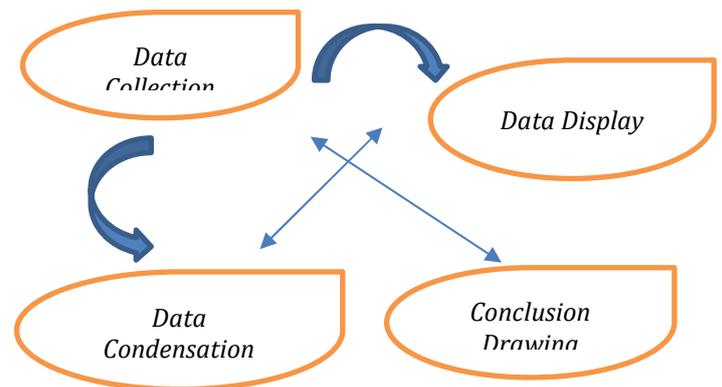
sarana dan prasarana serta pembiayaan penyelenggaraan PAUD agar lebih berkualitas. Untuk itulah, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “*Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan Penyelenggaraan PAUD dalam Persepektif Manajerial*”

Metode Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mencoba mengungkapkan fenomena sosial sebagai gambaran kelompok masyarakat. Oleh karena itu, terdapat batasan seperti waktu dan fokus penelitian, serta temuan data yang menjelaskan fakta dan membantu mengungkapkan atau mendapatkan teori yang relevan dengan topik penelitian (Flick, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data, membaca, dan mencatat. Kemudian data yang terkumpul dipilih dan ditetapkan sebagai data penelitian. Dengan demikian, desain ini dianggap tepat untuk menyampaikan dengan jelas sarana dan prasarana serta pembiayaan penyelenggaraan PAUD dilihat dari persepektif manajerial.

Data yang telah diperoleh kemudian disortir sesuai fokus peneliti dengan memberikan analisis pada data sehingga ditarik kesimpulan. Model

interaktif digunakan untuk analisis data, yang mencakup penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).



Gambar 3.4 Model Interaktif Miles, M.B., Huberman, A.M., Saldana.

Hasil dan Pembahasan

Sarana Prasarana

Sarana dianggap sebagai fasilitas yang harus mendukung semua aktivitas dalam proses pembelajaran di sebuah institusi pendidikan. Sarana berbentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk memungkinkan proses pendidikan di institusi tersebut berjalan dengan lancar, sarana dan prasarana diperlukan. Namun, prasarana adalah semua fasilitas yang secara tidak langsung membantu proses pendidikan. Contohnya yaitu halaman sekolah atau kondisi jalan yang menuju ke arah lembaga yang bersangkutan. Baik sarana

maupun prasarana sangat menunjang aktivitas proses pembelajaran dan eksistensi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sarana dan prasarana diatur dalam sebuah manajemen. Proses pendidikan diatur dan disiapkan oleh manajemen ini. Prasarana pendidikan terdiri dari semua item bergerak dan tidak bergerak yang diperlukan untuk mendukung aktifitas pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung (Manajemen Sekolah Rohiat, 2010). Perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah semua kegiatan yang termasuk dalam manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana diklasifikasikan dalam berbagai macam berdasarkan apakah sarana dan prasarana tidak lagi digunakan, tidak bergerak saat digunakan, atau tidak berhubungan dengan proses belajar mengajar.

Pembiayaan Pendidikan

Salah satu alasan mengapa amandemen UUD 1945 mencantumkan klausul tentang pendidikan adalah karena pendidikan termasuk biaya yang tinggi, padahal pendidikan seharusnya merata. Pemerintah harus memberikan 20% dari APBN dan APBD, menurut Konstitusi UUSPN Nomor 20/2003, Pasal 31, UUD

1945, "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran." Ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat akan mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan misi Kemdiknas, seperti ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan relevansi layanan pendidikan, kesetaraan layanan pendidikan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada sumber daya yang dialokasikan untuk pendidikan. Aksebilitas dan daya tampung tidak lagi menjadi prioritas dalam alokasi pendidikan. Untuk memastikan alokasi dana yang tepat, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengevaluasi seberapa efektif pembiayaan pendidikan.

Biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal adalah semua komponen biaya pendidikan (Sulistyoningrum, 2010). Biaya investasi terdiri dari biaya untuk menyediakan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan selama proses pembelajaran. Biaya operasi lebih berfokus pada gaji guru dan tenaga kependidikan, bahan dan peralatan pendidikan, dan biaya untuk menjalankan pendidikan. Hal ini sejalan

dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2007 tentang standar nasional pendidikan (SNP), di mana pasal 62 menyatakan bahwa biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal adalah komponen pembiayaan pendidikan (Depdiknas, 2005).

Penyelenggaraan PAUD

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa penyelenggaraan adalah kata benda yang mewakili proses, cara, atau perbuatan, seperti pelaksanaan. Oleh karena itu, penyelenggaraan PAUD adalah upaya untuk menerapkan prosedur pendidikan anak usia dini. Menurut UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan. Menurut Suparlan (2014), Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan nasional Indonesia, mengatakan bahwa pendidikan adalah tuntutan untuk

menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Namun, menurut lembaga formal, pendidikan adalah suatu proses meningkatkan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi (Heldrianto, 2013). Pendidikan, menurut Prof. H Mahmud Yunus dan Martinus Jan Lavengeld, adalah upaya untuk dengan sengaja mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, fisik, dan moral mereka sehingga secara bertahap membawa mereka ke arah tujuannya. Pendidikan usaha yang disengaja orangtua yang membuat mereka bertanggung jawab moral atas semua yang mereka lakukan.

Pendidikan sebagai sebuah proses, cara, dan perbuatan yang mendidik pada dasarnya merupakan usaha sadar orangtua untuk mempersiapkan generasi berikutnya bisa hidup mandiri. Generasi yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik secara berkelompok dalam keberagaman suku bangsa. Setiap kelompok memiliki sistem yang berbeda dalam mendidik satu dengan yang lainnya. Perkembangan dan kemajuan suatu masyarakat dipengaruhi oleh sistem pendidikan suatu masyarakat atau bangsa. Sistem terbentuk dari cara

pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang memiliki sudut pandang terbuka akan mudah menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan, termasuk pendidikan. Paulo Friere menjelaskan bahwa pendidikan harus mampu mengembalikan realitas sosial budaya manusia supaya terbebas dari hal-hal tindakan penindasan, kebodohan dan ketertinggalan.

Pendidikan Anak Usia Dini, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, halaman 6, adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dan dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar mereka siap untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Menurut Maimunah (2009:15), Pendidikan Anak Usia Dini Selama prosesnya, dia diberi insentif untuk membantu pertumbuhan fisik dan mentalnya, membuatnya siap untuk pendidikan lanjutan. Menurut Suryadi (2011), pendidikan anak usia dini didefinisikan sebagai anak-anak dari usia enam hingga enam tahun yang berada pada usia emas, atau usia emas, yang

dianggap sebagai usia penentu perkembangan untuk masa depan.

Perspektif Manajerial

Manajerial berhubungan dengan manajer, dan sementara manajer berarti orang yang mengatur pekerjaan di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai tujuan (KBBI). Istilah lain mengacu pada individu yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengawasi pelaksanaan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, perspektif manajerial dapat didefinisikan sebagai sudut pandang atau perspektif yang diambil oleh seorang pemimpin dalam melaksanakan suatu rencana untuk secara terampil mencapai tujuan bersama melalui pelaksanaan rencana tersebut.

Secara etimologis, "keterampilan" berasal dari kata "skill" dalam bahasa Inggris, yang berarti "kemahiran" atau "kecapakan". Keterampilan didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan tugas sesuai dengan kemampuan Anda dalam pekerjaan dan mencapai tujuan yang dapat diukur. Menurut Wahyudi (2012), untuk melaksanakan tugas manajerial dengan baik, diperlukan keterampilan manajerial. Jenis keterampilan yang diperlukan berbeda-

beda tergantung pada tingkat manajer dalam organisasi. Sebagai pengendali organisasi, peran manajer sangat penting. Manajer harus memiliki keterampilan konseptual, administrasi, manusiawi, dan teknik, menurut Wahyudi. Kepala sekolah berfungsi sebagai manajer dalam konteks pendidikan anak usia dini.

Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan Penyelenggaraan PAUD dilihat dari Persepektif Manajerial

Solusi manajerial yang tepat untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana serta pembiayaan PAUD dilihat dari perspektif manajerial adalah dengan cara perencanaan manajemen kerjasama. Karena tingginya kebutuhan pembiayaan lembaga PAUD minimalnya, ada banyak peluang untuk mendapatkan dukungan pembiayaan. Ada berbagai peluang yang dapat diakses melalui organisasi swasta atau pemerintah, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan lembaga PAUD itu sendiri (Yanto et al., 2020). Namun, walaupun mengadakan kerjasama dengan pemerintah maupun pihak swasta, komitmen lembaga PAUD terhadap kaidah untuk memenuhi skala prioritas menjadi sebuah keharusan. Skala prioritas perencanaan SDM, sarana prasarana dan pembiayaan harus dipegang teguh oleh lembaga PAUD jika

ingin lembaganya memiliki skala neraca pembiayaan yang stabil dan seimbang walaupun dalam kondisi ekonomi sosial yang selalu berubah dan tidak stabil, seperti adanya wabah pandemi Covid-19 dari tiga tahun silam sampai sekarang.

Manajemen perencanaan kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dengan pihak orangtua. Semangat gotong royong harus lebih diutamakan, hal ini menjadi ciri khas dan karakter rakyat indonesia, sehingga hal ini bisa diterapkan untuk memberdayakan masyarakat sekitar dalam hal ini orangtua sebagai kekuatan untuk meminimalisir atau mengatasi permasalahan pembiayaan. Tentu saja, keberhasilan proses kerja sama bergantung pada komunikasi yang efektif, sebab keterlibatan orangtua dan pihak yang kompeten bisa mengatasi keadaan permasalahan yang muncul di lembaga PAUD dari segi sarana prasarana dan pembiayaan (Hoffman et al., 2020). Hal ini sebagai upaya mewujudkan indikator tripusat pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat). Bentuk interaksi sosial budaya yang terwujud dari tripusat pendidikan ini bisa menekan tingginya pembiayaan dan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan fungsi sosial lembaga PAUD (Vodenko et

al., 2019), serta dapat mendapatkan cara untuk menggapai semua tujuan yang diputuskan terhadap perencanaan sarana prasarana juga biaya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) terhadap terlaksanya fungsi manajemen PAUD yang efektif (Firdaus, 2019).

Simpulan dan Rekomendasi

Salah satu permasalahan yang pelik dalam konteks penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini secara nasional yaitu sarana prasarana dan keuangan. Kondisi tersebut disebabkan oleh lingkungan lembaga pendidikan itu sendiri. Masalah utamanya terletak pada akumulasi kebutuhan dari manajemen lembaga pendidikan yang ideal. Lembaga pendidikan yang ideal memerlukan seperangkat acuan rencana, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap semua sumber daya yang ada untuk memperoleh tujuan yang diputuskan secara efektif dan efisien. Solusi manajerial yang tepat untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana serta pembiayaan PAUD dilihat dari perspektif manajerial adalah dengan cara perencanaan manajemen kerjasama. Karena besarnya keperluan keuangan instansi Pendidikan Anak Usia Dini sedikitnya, ada kesempatan untuk memperoleh dukungan keuangan.

Berbagai peluang bisa dari pihak swasta yang tidak mengikat terhadap lembaga PAUD itu sendiri. Namun, walaupun mengadakan kerjasama dengan pihak swasta, komitmen lembaga PAUD terhadap kaidah untuk memenuhi skala prioritas menjadi sebuah keharusan. Manajemen skala prioritas perencanaan SDM, sarana prasarana dan pembiayaan harus dipegang teguh oleh lembaga PAUD. Hal ini agar lembaga memiliki stabilitas neraca pembiayaan walaupun kondisi ekonomi sosial sedang tidak stabil.

Rekomendasi dalam hal manajerial sarana dan prasarana serta pembiayaan penyelenggaraan lembaga pendidikan perlu diberikan. Salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak luar, baik swasta maupun negeri. Hal ini tentu saja memerlukan relasi yang cukup komunikatif yang bisa dilakukan oleh pihak lembaga terhadap masyarakat di luar. Hal ini perlu dilakukan oleh pihak lembaga pendidikan untuk menemukan agar semua tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan sarana prasarana serta pembiayaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini bisa efektif berjalan.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Firdaus, N. M., & Ansori, A. (2019). "Optimizing Management of Early Childhood Education in Community Empowerment." *Journal of Nonformal Education* 5. (1), 89-96.
- Flick, U. 2007. *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publication
- Griffin, R.W. (2004). *Manajemen (Edisi ketujuh)*. Jakarta: Erlangga
- Heldrianto, Beni. (2013). "Pengaruh Prestasi Akademik dan Implementasi Pendidikan Karakter Terhadap Kesiapan Calon Guru". *Sosiologiqe Jurnal S-1 Ilmu Sosiologi*. Vol. 1 No 1.
- Hoffman, J. A., Uretsky, M. C., Patterson, L. B., & Green, B. L., (2020). *Effects of a school readiness intervention on family engagement during the kindergarten transition*. *Early Childhood Research Quarterly*, 53, 86-96. <http://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.02.005>.
- Idris, R. (2010). APBN pendidikan dan mahalnya biaya pendidikan. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 13 (1), 92-110. <http://doi.org/10.24252/lp.2010v13n1a7>.
- Jamilah, J. (2019). Kemitraan pendidikan anak usia dini (sinergi tiga pilar pendidikan: keluarga, sekolah dan masyarakat). *Simulacra*, 2(2). 181-194. <http://doi.org/10.21107/sml.v2i2.6045>.
- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed., Vol. 3). Retrieved from. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Muhibin Syah. (2007). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurlatif, R.V.N., & Priharwanti, A. (2019). Stunting: Besaran Masalah & Strategi Pencegahannya di Kabupaten Pekalongan. *Kajen: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembangunan*, 3 (02), 69-82.
- Rasmani, U.E.E. *Identification Of Early Childhood Education (ECE) Management*. *Early Childhood Education and Development Journal*, 2 (1), 1-8. <http://doi.org/10.20961/ecedj.v2i1.46915>.
- Rohiyatun, B., & Najwa, L. (2021). *Pengelolaan Sarana dan Prasarana di PAUD*. *Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan* 9, no. 1 (2021):1-5
- Sihaloho, M. J. (2016). *Ini Delapan Masalah PAUD di Indonesia*.
- Soedijanto. (2008). *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Sulistiyoningrum, Nining. (2010). *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Dari <http://niningsulistiyoningrum.wordpress.com/2010/05/standar->

- pembiayaan-
pendidikan/Diunduh pada
tanggal 28 Juni 2022.
- Suryadi, Didih. (2011). *Promosi Efektif
"Menggugah Minat dan Loyalitas
Pelanggan"*. Jakarta : PT. Suka
Buku
- Suryani, L. (2007). Analisis
Permasalahan Pendidikan Anak
Usia Dini dalam Masyarakat
Indonesia. *Jurnal Ilmiah Visi* 2
(1), 42-48.
[http://doi.org/10.21009/JIV.0201.
6](http://doi.org/10.21009/JIV.0201.6)
- Terry, G., and L. W. R. (2010). *Dasar-
dasar manajemen (cetakan
kesebelas)*. PT. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003
- Vodenko, K. V., Belasheva, I. V.,
Zalevskaya, A. A., Polshakova, I.
N., & Tleptserisheva, S. A. (2019).
*The State Management of
developmet of the profesional and
qualification potential in Russian
higher education. On the
Horizon*, 27 (3/4), 166 - 172.
<https://doi.org/https://doi.org/10>
- Wahyudi. (2012). *Kepemimpinan
Kepala Sekolah dalam Organisasi
Pembelajaran*. Bandung: CV.
Alfabeta.
- Wicaksono, S., Supriyanto, A.,
Sunandar, A., & Malang, U.N.
(2019). *Hubungan pemberian
fasilitas pendukung pendidikan
grtis dengan motivasi belajar
peserta didik sekolah menengah
pertama*. Amp: *Jurnal
Administrasi dan manajemen
pendidikan*, 2, 238-246.
- Wulansari, G., & Kurniati, E. (2019).
*Pembelajaran Calistung
(Membaca, Meulis, Berhitung)
dengan Resiko terjadi Stres
Akademik pada Anak Usia Dini*.
Tunas Siliwangi: *Jurnal Prgram
Studi Pendidikan Guru PAUD
STKIP Siliwangi Bandung*, 5 (1),
38-44
- Yanto, A., Imron, A., Djum, D & Benty,
N. (2020). *Manajemen
Pembelajaran Sekolah Dasar di
Daerah Tertinggal*. *JAMP: Jurnal
Administrasi dan Manajemen
Pendidikan*, 3 (1), 72-83.